



**Bagian Pengadaan Barang Jasa
Sekretariat Daerah Kota Solok**



POLICY BRIEF

**IMPLEMENTASI KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KOTA
SOLOK DALAM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI (P3DN)**

Policy Brief ini ditulis oleh

- Alfrinaldi, SE, MM**
 - Afriyandi Musra, ST, MT**
-

**Policy Brief ini ditujukan untuk
Pemerintah Kota Solok**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Instruksi Presiden No.2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Instruksi Walikota Solok Nomor 100.3.4.3-1-2023 tentang Transaksi E-Purchasing dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia Melalui Implementasi Katalog Elektronik Pemerintah Kota Solok. Namun, jumlah produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Kota Solok yang sudah tayang masih belum semua sektor usaha karena akibat beberapa alasan diantaranya masalah teknis selama proses pendaftaran, kurangnya pengetahuan tentang keuntungan Katalog Elektronik, dan kesulitan dalam memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Selain itu, kompetisi dengan perusahaan besar dalam Katalog Elektronik menjadi rintangan bagi usaha mikro, usaha kecil dan Koperasi untuk ikut berpartisipasi secara aktif. Untuk meningkatkan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui Katalog Elektronik Lokal, Pemerintah Kota Solok dapat melakukan sejumlah langkah. Pertama, Klinik E-Katalog, Konsolidasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, menetapkan target capaian, dan meningkatkan promosi produk UMKM dan Koperasi Kota Solok. Kedua, Pengurangan pajak atau retribusi daerah dalam menarik minat UMKM dan Koperasi. Ketiga, Memperkuat Sinergi Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi serta Kelompok Masyarakat.

PENDAHULUAN

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Walikota Solok menginstruksikan kepada Para Asisten, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Bendahara SKPD/Unit SKPD dan Bagian pada Sekretariat Daerah untuk melakukan transaksi *e-Purchasing* dengan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi di Kota Solok untuk belanja barang/jasa Pemerintah yang telah terdaftar pada Katalog Elektronik.

Secara umum instruksi tersebut berisikan langkah- langkah yang harus dilakukan oleh setiap Satuan Perangkat Daerah (SKPD), Unit Satuan Perangkat Daerah dan Bagian pada Sekretariat Daerah dalam belanja pengadaan barang/jasa memprioritaskan penggunaan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Kota Solok melalui Sistem Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kota Solok. Disamping itu Walikota Solok. Disamping itu Walikota Solok menginstruksikan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah agar mendorong usaha mikro, usaha kecil dan koperasi binaanya yang dapat menyediakan belanja barang/jasa Pemerintah Daerah untuk masuk (*on boarding*) ke dalam sistem e-Katalog Lokal Pemerintah Kota Solok dan mengkoordinasikan kepada seluruh Perangkat Daerah penyelenggara Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) untuk mendorong usaha mikro, usaha kecil dan koperasi binaanya masuk ke dalam sistem e-Katalog Lokal Pemerintah Kota Solok.

Dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok, jumlah produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang tayang dalam katalog elektronik lokal berjumlah 9.836 dan ini melebihi target yang sudah ditetapkan (Dashboard Monev Aplikasi e-Katalog LKPP, 19 Juni 2025). Namun demikian jika dilihat dari sisi jumlah usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang terdaftar pada Katalog Elektronik Lokal Kota Solok masih belum, sebagaimana yang ditemukan dalam beberapa literatur.

"Pada tahun 2022 jumlah Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi yang tayang pada Katalog Elektronik Lokal Kota Solok sebanyak 28.385 produk padahal jumlah etalase yang disediakan ada 20 etalase, baru 14 etalase yang terisi produknya"

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Solok
(sumber: dashboard monev e-Katalog.LKPP.go.id, 31 Desember 2022 kota Solok)

"Pada tahun 2023 jumlah produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi yang tayang pada Katalog Elektronik Lokal Kota Solok sebanyak 118.961, dengan jumlah etalase sebanyak 37 etalase, etalase yang terisi produk sebanyak 33 etalase"

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Solok,
(sumber : dashboard monev e-Katalog.LKPP.go.id, 31 Desember 2023)

"Pada tahun 2024 jumlah produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi yang tayang pada Katalog Elektronik Lokal Kota Solok sebanyak 233.242, dengan jumlah etalase sebanyak 37 etalase, etalase yang terisi produk sebanyak 36 etalase"

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Solok
(sumber: dashboard monev e-Katalog.LKPP.go.id, 31 Desember 2024)

"Pada tahun 2024 jumlah produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi yang tayang pada Katalog Elektronik Lokal Kota Solok sebanyak 233.242, dengan jumlah etalase sebanyak 37 etalase, etalase yang terisi produk sebanyak 36 etalase"

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
(sumber: www.antarane.ws.com, 3 Januari 2025)

Jika Pemerintah Kota Solok tidak segera memiliki kebijakan pengadaan barang dan jasa yang sepenuhnya memprioritaskan Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi, maka realisasi pengadaan barang dan jasa yang mengutamakan Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi paling sedikit 40% tidak akan terpenuhi (sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022).

DESKRIPSI MASALAH

Amanah peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) yang dimotori oleh LKPP adalah arahan pemerintah untuk mendorong penggunaan produk-produk buatan Indonesia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK). Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri minimal 95% dan alokasi pembelian produk UMKK minimal 40%. Namun masih ditemui masalah, salah satunya adalah banyak pelaku usaha mikro, usaha kecil dan koperasi (UMKK) yang belum mendaftarkan dan menayangkan produk pada Katalog Elektronik terutama Katalog Elektronik Lokal, yang disebabkan oleh empat (4) hal sebagai berikut:

1 Kesulitan pendaftaran, kurang pengetahuan dan literasi digital

Banyaknya persyaratan pengurusan Katalog Elektronik seperti mencantumkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Induk Kependudukan atau NIK, NPWP, dan Keterangan Usaha, yang sebelumnya harus ada SNI. Tetap saja kendala untuk NIB banyak UMKM yang belum paham dan juga tidak semua pelaku UMKM punya NPWP. Butuh sosialisasi dan kepastian akan hal hal yang harus dijelaskan kepada UMKM (www.akunmandiri.org, 2022). Terlebih lagi pendaftarannya dilakukan secara daring, dan ini menyulitkan pelaku UMKM berusia lanjut cenderung kurang memahami cara penggunaan media digital (Rini Rimawati dkk, 2022).

2 Keterbatasan Modal dan Sumber Daya Manusia

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan banyak pelaku UMKM belum mendapatkan akses permodalan dari pemerintah. Hal ini tercermin dari 5 juta UMKM masih mengandalkan pinjaman dari rentenir dengan bunga tinggi, karena Hal ini dikarenakan kontribusi lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman ke UMKM masih rendah yakni hanya sekitar 20 persen (cnnindonesia.com, 2023). Sumber daya penyedia yang lemah khususnya penyedia/pelaku UMKM juga menjadi permasalahan dalam implemementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah metode pemilihan *e-purchasing* melalui aplikasi *e-katalog* lokal (Putri Pebriani dkk, 2025).

3 Keterlambatan pembayaran dari instansi pemerintah daerah dan Kewajiban Perpajakan

Kekhawatiran pelaku UMKM soal lambannya pembayaran oleh pemerintah untuk produk UMKM yang dibeli di aplikasi e-katalog yang berpengaruh terhadap biaya produksi dan operasional (www.akunmandiri.org, 2022). Kewajiban perpajakan memang menjadi salah satu faktor penyebab UMKM enggan mendaftar e-katalog. Rasa takut akan kewajiban pajak, terutama dalam hal administrasi dan perhitungan, membuat banyak pelaku UMKM enggan terlibat dalam proses pendaftaran *e-katalog* (www.topikaltim.com, 2024). Dalam percepatan pembayaran belanja APBD dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kota Solok melaksanakan penerapan pembayaran dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan UMKM pada umumnya untuk meningkatnya perputaran uang pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya Kota Solok (utamapost.co.id, 2024)

4 Standarisasi dan Sertifikat Produk UMKM belum terpenuhi untuk semua bidang usaha

UMKM perlu meningkatkan dan menjaga konsistensi mutu produk yang dihasilkan, sehingga kualitasnya dapat memenuhi persyaratan standar/teknis di nasional maupun internasional. (megapolitan.antaranews.com). Pemerintah Kota Solok terus mendorong UMKM untuk mendapatkan standarisasi dan sertifikasi produk serta sertifikasi halal melalui kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan pelatihan untuk membantu pelaku UMKM memperoleh sertifikasi (infopublik.solokkota.go.id, 2024)

ALTERNATIF SOLUSI

Untuk memotivasi dan mendorong agar Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi (UMKK) lokal Kota Solok untuk mendaftar dan menayangkan produknya pada Aplikasi e-Katalog terutama e-Katalog Lokal, ada 3 (tiga) alternatif solusi yaitu :

1 Klinik E-Katalog, Konsolidasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, menetapkan target capaian, dan meningkatkan promosi

Alternatif ini berhubungan dengan langkah-langkah yang dapat diterapkan di Lingkungan Pemerintah Kota Solok untuk mempercepat peningkatan jumlah UMKM dan Koperasi yang terdaftar dalam katalog elektronik. Langkah-langkah itu meliputi, pertama, menghadirkan klinik E-Katalog untuk UMKM dan Koperasi. Klinik ini akan berperan sebagai tempat untuk menyampaikan informasi serta menyediakan bantuan dalam pengurusan izin dan pengisian data tentang identitas dan produk UMKM serta Koperasi di *E-Katalog* Lokal Kota Solok. Kedua, pengumpulan perangkat daerah yang belum atau masih rendah dalam penerapan Kartu Kredit Pemerintah. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh masing-masing perangkat daerah dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Ketiga, menetapkan target jumlah UMKM dan Koperasi yang tergabung dalam E-Katalog Lokal Kota Solok setiap tahun. Keempat, memperbaiki promosi untuk UMKM dan Koperasi di dalam Pemerintah Kota Solok. Ini dilakukan melalui pengiriman profil UMKM dan Koperasi yang baru tergabung dalam E-Katalog Lokal Kota Solok kepada seluruh perangkat daerah oleh LPSE sebagai pengelola *E-Katalog*. Selain itu, promosi juga dapat dilakukan dengan menerbitkan informasi tentang UMKM dan produk-produknya di situs web serta media sosial yang dikelola oleh LPSE Kota Solok dan Pemerintah Kota Solok.

2 Pengurangan pajak atau retribusi daerah dalam menarik minat UMKM dan Koperasi

Alternatif ini diambil agar dapat menarik perhatian pelaku UMKM dan Koperasi untuk mendaftar ke dalam E-Katalog. Pemerintah Kota Solok memberikan berbagai insentif kepada para pengusaha agar mereka dapat bergabung dalam *E-Katalog*. Insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan terhadap pajak daerah serta retribusi, pelatihan gratis yang berkaitan dengan peningkatan mutu produk sampai ke aspek pemasaran, serta dukungan terhadap sarana dan prasarana dalam produksi. Selain itu, secara berkala Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi kepada UMKM dan Koperasi mengenai persentase serta jumlah anggaran yang harus digunakan untuk belanja pada produk UMKM dan Koperasi melalui *E-Katalog*.

3 Memperkuat Sinergi Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi serta Kelompok Masyarakat

Pada alternatif ini, langkah yang dapat diambil oleh pemerintah kota solok adalah pertama, Pemerintah Kota Solok bekerja sama dengan KADIN, DEKRANASDA, sektor swasta, UMKM dan masyarakat . Kerja sama ini diciptakan dengan melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk serta mengembangkan usaha UMKM dan Koperasi. Beberapa program yang bisa dilakukan antara lain Bedah Produk (belajar dari barang-barang impor), Kelas Inspiratif (berbagi pengetahuan dari profesional di bidang kewirausahaan), Coaching Class (pendampingan dari UMKM dan Koperasi yang telah berhasil), dan masih banyak lagi.

Kedua, mengadakan pertemuan bisnis antara pelaku UMKM dan koperasi yang berfungsi sebagai pemasok dengan pemerintah daerah yang berperan sebagai pembeli secara rutin. Dengan ini, diharapkan UMKM dan koperasi dapat memperluas variasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Ketiga, mendorong kolaborasi antara UMKM dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk memenuhi tuntutan tenaga kerja. Ini akan menciptakan hubungan saling menguntungkan, di mana UMKM dan koperasi dapat memenuhi kebutuhan sumber daya ketika diperlukan, dan siswa memiliki kesempatan untuk melakukan magang atau praktik sesuai dengan bidang studi mereka. Keempat, menjalankan kerjasama dengan bank dan sektor swasta untuk mempermudah akses terhadap bantuan atau pinjaman modal bagi UMKM dan koperasi yang telah mendaftarkan produk mereka di E-Katalog. Untuk mempercepat UMKM dan koperasi dalam pendaftaran produknya, perlu disediakan kuota bantuan atau pinjaman bagi UMKM dan koperasi yang terlebih dahulu terdaftar di katalog elektronik..

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Ketiga alternatif tersebut dapat dijadikan rekomendasi dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Kota Solok dalam hal Implementasi Katalog Elektronik (e-Katalog) local Kota Solok dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) serta peningkatan pertumbuhan ekonomi Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi di Kota Solok.

DAFTAR PUSTAKA

- akumandiri.org.(2022). Asosiasi Akui Banyak UMKM yang Tak Masuk E-Katalog. Diakses dari <https://www.akumandiri.org/umkm-tak-masuk-e-katalog/tanggal> 12 Oktober 2022.
- Rini Rismawati, Ranti R Saputri, Nurul Amaliyah, Fahri Ramdani, Akmal Nabilan Frifantio. (2022). Kesiapan Digitalisasi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pengolahan Kerupuk Sangrai di Desa sukaresik kecamatan sindangkasih kabupaten ciamis
- cnnindonesia.com.(2023). Sri Mulyani Sebut 5 Juta UMKM Masih Cari Modal ke Rentenir. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230126154844-532-905248/sri-mulyani-sebut-5-juta-umkm-masih-cari-modal-ke-rentenir> tanggal 26 Januari 2023
- Putri Pebrianti, Maesaraoh. (2025). Implementasi Kebijakan E-Katalog Sebagai Wujud Pengadaan Barang/Jasa Elektronik Di Kabupaten Semarang. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/50438>
- Topikaltim.(2024). DPRD Sebut UMKM Samarinda Hadapi Tantangan e-Katalog dan Pajak. Diakses dari <https://www.topikaltim.com/dprd-sebut-umkm-samarinda-hadapi-tantangan-e-katalog-dan-pajak/> tanggal 12 Maret 2024
- utamapost.co.id. (2024) . Terapkan KKPD, Pemko Solok bersama Bank Nagari Adakan Sosialisasi. Diakses dari <https://utamapost.co.id/terapkan-kkpd-pemko-solok-bersama-bank-nagari-adakan-sosialisasi/> tanggal 17 Januari 2024
- megapolitan.antaranews.com. (2022). Standardisasi dan sertifikasi produk UMKM penting untuk tingkatan daya saing. Diakses dari <https://megapolitan.antaranews.com/berita/221145/standardisasi-dan-sertifikasi-produk-umkm-penting-untuk-tingkatan-daya-saing> tanggal 22 November 2022
- Infopublik.solokkota.go.id. (2024). Kick Off Edukasi Sertifikasi Halal Diakses dari <https://infopublik.solokkota.go.id/berita/detail/kick-off-edukasi-sertifikasi-halal> tanggal 27 Agustus 2024